

Strategi Karakteristik Perbatasan untuk mendukung Optimalisasi Perdagangan Wilayah Perbatasan di Kalimantan Barat

Suhartono^a, Ahmad Shalahuddin^a

Universitas Tanjungpura, Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Bansir Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78124.

*aronverta4@gmail.com

Abstrak

Dalam rangka mewujudkan pendekatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan maka perlu dikembangkannya perdagangan lintas batas sebagai embrio utama pemacu peningkatan ekonomi perbatasan. Untuk melakukan optimalisasi perdagangan di wilayah perbatasan dilakukan analisa melalui karakteristik perbatasan dengan acuan permasalahan dan langkah strategis penyelesaian permasalahan. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisa strategi dari karakteristik perbatasan dalam mendukung optimalisasi perdagangan wilayah perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif yang menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan normative yaitu dengan menganalisa permasalahan dari sudut pandang atau literature review dan juga bahan pustaka serta ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku dan tertulis. Design penelitian lebih mengambil penitikberatkan pada data sekunder. Penelitian menunjukkan bahwa strategi optimalisasi yang dapat dilakukan adalah dengan melibatkan segenap pemangku kepentingan serta peran dari masyarakat sekitar perbatasan untuk pengelolaan perbatasan yang lebih baik. Langkah-langkah strategis sudah dilakukan pemerintah untuk mendorong pengelolaan perdagangan perbatasan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan, namun setiap langkah pemerintah tidak dapat dilakukan secara optimal tanpa adanya dukungan dari masyarakat setempat, sehingga perlu dilakukan pembinaan dari pemerintah kepada masyarakat perbatasan tentang pentingnya sarana dan prasarana pertahanan serta bagaimana memanfaatkan hasil alam secara bijak dan berkelanjutan yang sesuai dengan peraturan yang ada, Penataan ruang untuk pengembangan infrastruktur juga perlu dikaji lebih lanjut guna optimalisasi perdagangan perbatasan yang dapat mengakses seluruh pedesaan sekitar perbatasan, Pos Lintas Batas negara juga perlu dilakukan peningkatan pengawasan dengan pengembangan karakter pegawai perbatasan dan menambah jumlah penjaga guna penerapan peraturan yang lebih baik dan juga sebagai akses untuk perdagangan internasional.

Kata kunci: karakteristik perbatasan, perdagangan perbatasan, optimalisasi

PENDAHULUAN

Percepatan pengembangan perekonomian di wilayah perbatasan merupakan amanat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2021, sehingga menjadi sangat prioritas untuk memberikan efek peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Seiring berjalannya waktu setiap implementasi selalu ada permasalahan-permasalahan baru didalam program pendekatan kesejahteraan yang dilakukan pemerintah. Permasalahan ini dapat dilihat dari adanya ketimpangan pengembangan infrastruktur yang dilakukan pemerintah dengan hasil dari pendapat masyarakat di wilayah perbatasan, PLBN juga perlu disertai peraturan-peraturan yang berkaitan

dengan aktivitas lintas batas sebagai upaya penegakan hukum yang berlaku. awal penegakan peraturan dalam melakukan penyelesaian persoalan perdagangan dan perlintasan di daerah perbatasan, Pemerintah Indonesia dan Malaysia melaksanakan kesepakatan, dimana Kesepakatan dikenal dengan *Border Trade Agreement* (BTA) pada tahun 1970. Dengan telah adanya perjanjian BTA yang disepakati telah menjadi regulasi yang baku perihal pemberian batasan-batasan pembelian yang telah ditetapkan pemerintah. Selain itu perjanjian ini juga menjadi suatu permasalahan tersendiri bagi masyarakat perbatasan dikarenakan umumnya untuk mereka yang berusaha meningkatkan modal dagangnya adalah dengan cara membeli produk Malaysia untuk selanjutnya dijual lagi di wilayah Indonesia, sehingga batasan-batasan ini menjadi permasalahan tersendiri bagi masyarakat perbatasan.

Perbatasan juga merupakan tempat jalur lintas perdagangan internasional yang rentan dengan suatu kasus yang berhubungan dengan penyelundupan dan barang-barang illegal. Hal ini juga terjadi karena adanya kesejahteraan dan kesenjangan yang timpang terlebih di wilayah perbatasan. Kesenjangan di wilayah perbatasan juga disebabkan beberapa faktor yang paling dominan dan paling signifikan urgensinya adalah kurangnya infrastruktur yang memadai seperti transportasi, teknologi informasi dan pengelolaan sumber daya lokal yang minim, sehingga perlu dilakukan penataan yang tepat sasaran. Selanjutnya untuk pengembangan wilayah perbatasan keberlanjutan juga perlu dikaji untuk kemudahan melakukan investasi di wilayah perbatasan. yang kesemuaan perlu dilakukan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan yang merupakan bagian dari prinsip manajemen yang diterapkan di wilayah perbatasan. Merujuk teori Stephen B. Jones membagi ruang lingkup pengelolaan perbatasan dalam empat bagian, yaitu *allocation, delimitation, demarcation* dan *administration/management*. Proses perencanaan pengembangan wilayah perbatasan dapat menggunakan tiga pendekatan, yaitu dengan mendahulukan pembangunan infrastruktur, mendahulukan investasi di sektor swasta, dan mendahulukan program-program dan kebijakan. Sehingga untuk mengukur keberlanjutan dari masing-masing persoalan di wilayah perbatasan perlu dikelola Kembali administrasi atau manajemen perdagangan perbatasan dengan menentukan potensi, masalah serta arahan strategi pengembangan kawasan perbatasan Kalimantan Barat dengan menggunakan studi literatur yang telah ada, selanjutnya diberikan saran dan simpulan penelitian lebih lanjut berdasarkan data-data serta metode yang lebih spesifik. Penelitian merujuk pada penelitian yang dilakukan (Mayona et al., 2011) mengungkapkan penyusunan strategi peningkatan sarana dasar khususnya jaringan komunikasi untuk menunjang pengembangan perbatasan Kalimantan Barat, mengupayakan percepatan pembangunan pos lintas batas untuk mendukung pengembangan wilayah dan mempermudah kegiatan ekspor hasil perkebunan dan kayu ke Malaysia, perbaikan prasarana jalan di sepanjang perbatasan RI-Malaysia untuk peningkatan pengembangan perbatasan, peningkatan kualitas akses komunikasi untuk mempermudah penyampaian

informasi mengenai kegiatan illegal logging dan penyelundupan tenaga kerja Indonesia (TKI), Mempercepat pembangunan pos lintas batas untuk mendukung kawasan perbatasan sebagai beranda depan. Sehubungan dengan permasalahan yang diuraikan dan teori yang dikemukakan maka penulis mencoba mengangkat penelitian dengan tema Strategi Berdasarkan Karakteristik Perbatasan untuk mendukung Optimalisasi Perdagangan Wilayah Perbatasan di Kalimantan Barat. Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan gambaran penyusunan arahan strategi dalam pengembangan perdagangan perbatasan melalui karakteristik perbatasan yang dipetakan. Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah dengan mengambil pembaharuan informasi data dalam serangkaian langkah-langkah optimalisasi perdagangan perbatasan melalui literatur review jurnal, berita, media dan pemberian saran dan simpulan solusi berdasarkan kajian teori yang relevan.

KAJIAN LITERATUR

Strategi adalah suatu tindakan yang memiliki sifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa yang akan datang. Strategi juga memiliki sifat yang menyatu, menyeluruh, dan integral. Tahapan penyusunan perencanaan strategis menurut Rangkuti (2014:21) yaitu: 1) Tahap Pengumpulan Data 2) Tahap Analisa. Strategi manajemen yang jadi fokus Analisa yaitu bagaimana mendapatkan suatu strategi yang tepat dalam melakukan optimalisasi manajemen perdagangan di wilayah perbatasan terkhusus Kalimantan Barat. Secara umum persoalan Kawasan perbatasan dapat dikelompokkan pada tiga aspek. Aspek pertama sosial ekonomi wilayah perbatasan dimana terdapat daerah perbatasan yang dalam kondisi kurang berkembang dan kurang menjadi perhatian dikarenakan lokasi terpencil dan relatif terisolasi dengan tingkat aksesibilitas yang rendah. Aspek kedua adalah aspek pertahanan keamanan kawasan perbatasan, dimana kawasan perbatasan merupakan lokasi yang cukup luas dengan pola penyebaran penduduk tidak merata. Hal itu menyebabkan pengendalian oleh pemerintah sulit dilakukan. Ketiga, pengaruh negara tetangga pada aspek sosial ekonomi di kawasan perbatasan dapat mengundang kerawanan baik di bidang ekonomi maupun politik (Djaka Marwasta, 2016). Setiawan (2014) dari aspek kawasan perbatasan ada tujuh jenis karakteristik kawasan perbatasan yaitu 1) Karakteristik fisik garis batas di darat dan laut, secara letak geografis daerah kawasan perbatasan merupakan daerah yang cukup luas dimana Kalimantan Barat memiliki panjang garis perbatasan 966 km, sehingga dalam penanganannya cukup menyulitkan, Kondisi ini semakin sulit dengan kondisi infrastruktur jalan yang masih sangat terbatas baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitasnya. 2) Karakteristik infrastruktur pelayanan masyarakat, seperti penyediaan jalan dan jembatan, Penyediaan infrastruktur air bersih, Penyediaan infrastruktur irigasi (air bersih dan pertanian), Penyediaan infrastruktur perumahan. 3) Sarana dan prasarana pertahanan seperti pendidikan, kesehatan, perhubungan, komunikasi dan informasi serta permukiman masih sangat terbatas, jumlah Pos Pemeriksa Lintas Batas (PPLB) masih terbatas. 4)

Karakteristik penduduk, penyebaran penduduk di wilayah perbatasan umumnya jarang dan tidak merata bahkan di pulau-pulau terluar ada yang tidak berpenghuni dan terpencil. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia, arus mobilitas tenaga kerja, secara etnis, penduduk yang berada di perbatasan memiliki hubungan keluarga dengan negara tetangga. 5) Karakteristik ekonomi, tingginya perbedaan harga jual produk-produk lokal jika dibanding dengan negara tetangga, keberadaan produk-produk yang berasal dari sumber daya alam belum memiliki nilai tambah karena merupakan produk mentah. 6) Karakteristik sumber daya alam, potensi sumberdaya alam di wilayah perbatasan meliputi potensi pertambangan, kehutanan, perkebunan / pertanian, perikanan, dan sumber daya air (daerah tangkapan air). 7) Karakteristik fungsi dan pemanfaatan ruang, pemanfaatan kawasan lindung yang rawan terhadap eksploitasi, tempat perlindungan satwa, flora endemic, kawasan budidaya kelapa sawit, karet serta perikanan tangkap di Kawasan perbatasan laut.

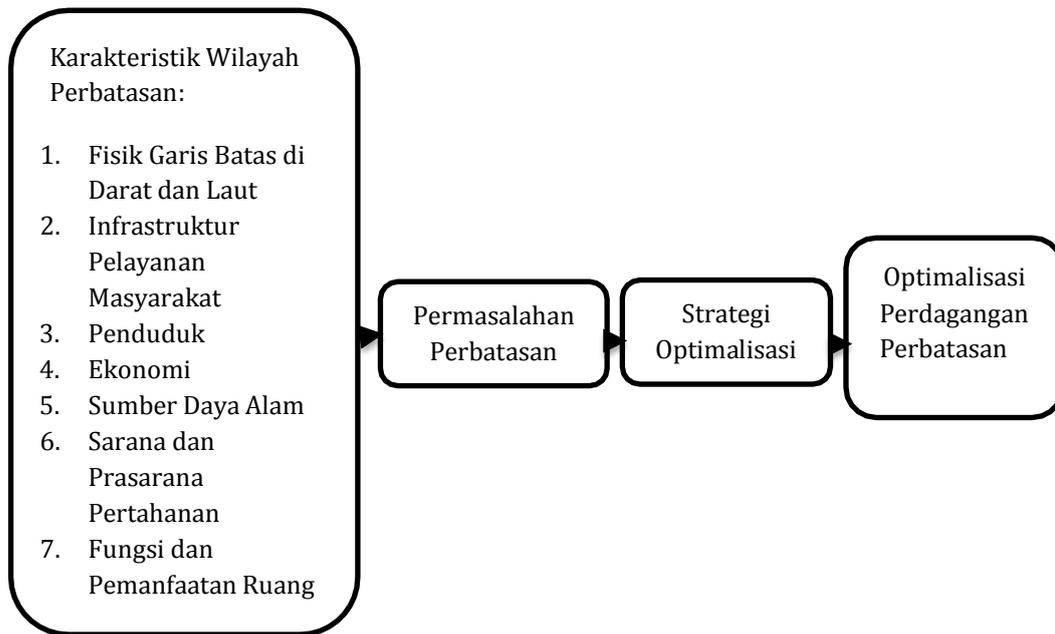
Pada penjelasan dibawah telah disusun Langkah-langkah analisis terhadap strategi karakteristik perbatasan untuk mendukung optimalisasi perdagangan wilayah perbatasan di Kalimantan Barat.

Tabel 1. Tahapan Analisis

Sasaran	Tahapan Analisis	Metode dan Alat Analisis	Output
Melakukan Identifikasi strategi strategi dan optimalisasi manajemen perdagangan Kawasan perbatasan Kalimantan Barat dengan meninjau kondisi Eksiting kawasan dan permasalahan wilayah perbatasan Kalimantan Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tinjauan Kondisi Eksiting kawasan dan permasalahan wilayah perbatasan Kalimantan Barat berdasarkan data dari literatur review tentang perbatasan 2. Kondisi Eksiting atau karakteristik Kawasan perbatasan yang dikhususkan pada tujuh karakteristik Kawasan perbatasan 	Metode yang digunakan adalah deskriptif Kualitatif dengan pendekatan normative berdasarkan literatur review, laporan, kajian ilmiah dan peraturan perundang-undangan.	Mengetahui Identifikasi strategi-strategi dan optimalisasi manajemen perdagangan Kawasan perbatasan Kalimantan Barat

Sumber : Dikembangkan penulis untuk kebutuhan penelitian (2022)

Model hipotesis yang dilakukan dengan cara merumuskan karakteristik wilayah perbatasan yang dikembangkan perihal permasalahan yang terjadi berdasarkan studi dan informasi, selanjutnya dilakukan kajian strategi-strategi atau solusi penyelesaian masalah berdasarkan dari *literature review*, maka dapat disampaikan gambar konseptual penelitian sebagai berikut:



Gambar 1. Model Hipotesis Penelitian

Sumber: Dikembangkan penulis untuk kebutuhan penelitian, 2022

METODE PENELITIAN

Pendekatan analisis data adalah dengan penelitian kualitatif yang menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan normative yaitu dengan menganalisa permasalahan dari sudut pandang atau *literature review* dan juga bahan pustaka serta ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku dan tertulis. Design penelitian lebih mengambil penitikberatkan pada data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis, dan juga data dari instansi terkait dengan pengembangan perbatasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rencana Penyusunan pengembangan suatu kawasan perbatasan dapat dilakukan dengan suatu analisis yang bertujuan untuk mengetahui potensi dan kendala. Analisa ini meliputi tinjauan terhadap pengembangan perbatasan Kalimantan Barat dari kondisi internal dan eksternal. perlu dilakukan pengelompokan variabel penentu pengembangan perbatasan Kalimantan Barat. Adapun variabel dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Pengelompokan Faktor Berdasarkan Variabel Penentu Pengembangan Perbatasan Kalimantan Barat

Variabel	Dimensi	Indikator	Pengelompokan Faktor
aspek sosial ekonomi	1. Pengembangan Sektor-sektor unggulan	1. Potensi Sektor basis di Kawasan perbatasan	1. Karakteristik infrastruktur

wilayah perbatasan	diwilayah perbatasan 2. Perekonomian Daerah perbatasan 3. Pendapatan Daerah perbatasan 4. Struktur penduduk	2. Jumlah Angkatan kerja, LPE, pengembangan infrastruktur pelayanan publik 3. Pendapat asli daerah, pajak daerah, retribusi daerah, PDRB perkapita 4. Lokasinya terpencil / terisolasi dengan tingkat aksesibilitas rendah, sehingga tingkat mobilitas kehidupan dan gerak Langkah masyarakat pun menjadi rendah.	pelayanan masyarakat. 2. Penduduk 3. Ekonomi
aspek pertahanan keamanan kawasan perbatasan	1. Sarana dan Prasarana keamanan memadai 2. Pengelolaan penegakan supremasi hukum wilayah perbatasan didarat dan dilaut	1. Ketersediaan sarana dan prasarana umum di Kawasan perbatasan (kantor bea dan cukai, kantor imigrasi, serta pos keamanan). 2. Pengaturan patroli jaga wilayah kedaulatan dengan peningkatan tenaga penegak hukum	4. Sarana dan Prasarana Pertahanan 5. Sumber Daya Alam 6. Fungsi dan Pemanfaatan Ruang
pengaruh negara tetangga pada aspek sosial ekonomi	1. Akses informasi teknologi 2. Akses fasilitas Kesehatan 3. Ketergantungan social dalam perdagangan perbatasan	1. Derasnya informasi dan komunikasi yang lebih baik dari negara tetangga 2. Kemudahan untuk menikmati fasilitas Kesehatan dari negara tetangga. 3. Harga jual kebutuhan pokok yang lebih murah dari negara tetangga	7. Fisik Garis Batas di darat dan laut

Sumber : Dikembangkan penulis untuk kebutuhan penelitian, 2022

Tabel 3. Indikator dari faktor-faktor karakteristik Wilayah perbatasan

Faktor	Indikator	Sasaran
fisik garis batas di darat dan laut	1. Seringnya terjadi persoalan illegal logging 2. Peyelundupan gula 3. Penyelundupan narkotika 4. Pendistribusian TKI illegal 5. Illegal fishing 6. Pergeseran patok perbatasan	Penyelesaian dan penetapan batas wilayah negara guna mendukung perdagangan perbatasan
Karakteristik infrastruktur pelayanan masyarakat	Indeks kepuasan layanan infrastruktur (IKLI) 1. Penyediaan jalan dan jembatan yang berkualitas; 2. Penyediaan transportasi (Darat dan ASDP, Laut, dan Udara);	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana

	3. Penyediaan infrastruktur air bersih; 4. Penyediaan infrastruktur Irigasi (pertanian dan air baku); 5. Penyediaan infrastruktur perumahan	pendukung perdagangan untuk masyarakat diperbatasan
Penduduk	1. Tingkat kemajuan material (<i>material wellbeing</i>), 2. Kesehatan (<i>health</i>) 3. Stabilitas politik dan keamanan (<i>political stability and security</i>) 4. Jaminan kerja (<i>job security</i>) 5. Kehidupan keluarga (<i>family life</i>) 6. Iklim dan geografi (<i>climate and geography</i>) 7. Kehidupan sosial (<i>community life</i>) 8. Kebebasan politik (<i>political freedom</i>) 9. Kesetaraan jender (<i>gender equality</i>)	Peningkatan pelayanan sosial dasar guna mendukung kependudukan yang mampu berdaya saing dalam perdagangan perbatasan
Ekonomi	elemen penting pengembangan wilayah perbatasan darat antarnegara dengan basis pada pertumbuhan ekonomi.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi
Sumber Daya Alam	1. Pengelolaan Potensi sumber daya alam yang berada di kawasan perbatasan seperti bahan tambang (emas dan batu bara), potensi hutan dan perkebunan sawit, lada, karet, 2. pemanfaatan sumber daya alam agar tidak dilakukan secara ilegal dan tak terkendali dan dikelola sesuai peraturan yang berlaku	Pengoptimalisasian pemanfaatan lahan dan Sumber Daya Alam untuk mendukung bahan baku perdagangan perbatasan
Sarana dan Prasarana Pertahanan	Regulasi dan pengawasan pengelolaan sarana dan prasarana pertahanan seperti sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, perhubungan, penerangan dan komunikasi	Peningkatan upaya pertahanan, keamanan dan penegakan hukum untuk meningkatkan regulasi perdagangan perbatasan
Fungsi dan Pemanfaatan Ruang	Pemetaan terhadap geografis dan topografi wilayah perbatasan, pengaturan tata ruang pengembangan potensi-potensi wilayah	Penguatan kapasitas kelembagaan secara terintegrasi

Sumber : Dikembangkan penulis untuk kebutuhan penelitian, 2022

Tabel 4. Permasalahan di Perbatasan Kalimantan Barat

Faktor	Permasalahan
fisik garis batas di darat dan laut	1. Adanya praktek illegal logging dimana telah diamankan puluhan batang kayu saat melaksanakan kegiatan patroli di kawasan jalur illegal, Kabupaten Bengkayang, Kalbar (jpnn.com, 2021). 2. Maraknya penyelundupan gula illegal di Kawasan perbatasan Entikong Kalimantan Barat dengan Serawak (Widodo, 2016). 3. Tim gabungan mengamankan penyelundupan 7,3 kilogram sabu di Kecamatan Tayan Hilir (kalbar.inews.id, 2020). 4. Kantor Imigrasi Putussibau pulangkan 41 orang tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat (imigrasi.go.id, 2021).

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Sebanyak 18 (delapan belas) Kapal Perikanan Asing (KIA) ilegal yang terdiri dari 16 kapal berbendera Vietnam dan 2 kapal berbendera Malaysia dimusnahkan dengan cara ditenggelamkan di Pontianak, Kalimantan Barat (kkp.go.id, 2019). 6. upaya penyelundupan atau ekspor 100 ton rotan ilegal yang diangkut di perairan Tanjung Datu, Kalimantan Barat (cendananews.com, 2021).
Karakteristik infrastruktur pelayanan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyalahgunaan fasilitas perjanjian perdagangan oleh penduduk yang berkolaborasi dengan pelaku usaha (Widodo, 2016). 2. Permasalahan yang kerap terjadi adalah keterbatasan akses layanan transportasi (bisnisnews.id, 2019). 3. Minimnya jumlah operator layanan Komunikasi Serta Kondisi Sinyal Telepon Seluler (BPS, Kecamatan Entikong dalam angka 2020). 4. Kesulitan air bersih, akibat sumber air mengalami kekeringan. Jaringan air bersih ada namun tidak berfungsi (bisnisnews.id, 2019).
Penduduk	Masyarakat kawasan perbatasan dalam kategori terbatas secara sosial ekonomi dan identik dengan kemiskinan (Listyawati & ayal, 2018).
Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peran kebijakan dan infrastruktur yang belum mendukung pengembangan (Irsan, Muta'ali, & Sudrajat, 2017). 2. Keterisolasian, keterbelakangan, kemiskinan, mahal nya harga barang dan jasa, keterbatasan prasarana dan sarana pelayanan publik (infrastruktur), rendahnya kualitas SDM, dan penyebaran penduduk yang tidak merata (Hermanto, 2011).
Sumber Daya Alam	Perbedaan kepentingan pemerintah, masyarakat, dan korporasi menjadi konflik pengelolaan sumber daya alam (Herdiansyah, 2019).
Sarana dan Prasarana Pertahanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan prasarana pendidikan di kawasan perbatasan Entikong tidak dibangun dengan pondasi yang kuat sehingga sudah banyak yang rusak dan tidak layak pakai. (Yosada, 2016). 2. Keterjangkauan pelayanan kesehatan dan jaringannya masih rendah (suharmiati, Handayani, & Kristiana, 2012). 3. Permasalahan yang kerap terjadi adalah keterbatasan akses layanan transportasi (www.bisnisnews.id, 2019). 4. konflik dimaknai beragam oleh masyarakat (Djuhardi, 2019). 5. warga di perbatasan Kalimantan Barat memilih berpindah berganti kewarganegaraan Malaysia (www.dpd.go.id, 2010).
Fungsi dan Pemanfaatan Ruang	PLBN Entikong belum dapat mengakomodir ekspor impor dikarenakan ketiadaan sarana maupun prasarana (Niko, 2019).

Sumber : Jurnal, surat kabar online, artikel prosiding untuk kepentingan penelitian, 2022.

Strategi Optimalisasi Perdagangan perbatasan Fisik Garis Batas di darat dan laut

Merujuk pada karakteristik fisik garis batas di darat dan laut strategi optimalisasi yang dapat dilakukan adalah, 1) Pemerintah Indonesia memerlukan keterlibatan semua pihak untuk menuntaskan seluruh aspek yang terkait dengan permasalahan pembalakan liar, baik masyarakat, maupun pengusaha. Untuk melakukan demarkasi di lapangan dengan melibatkan masyarakat setempat dengan cara melakukan sosialisasi (Irawan et al., 2020). 2) Solusi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menanggulangi peredaran narkotika di wilayah perbatasan Kalimantan Barat (Indonesia) ± Sarawak (Malaysia) dengan cara sesegera mungkin membentuk Satuan Tugas (Satgas) Interdiksi di kawasan

perbatasan Kalimantan Barat guna mencegah peredaran narkoba jaringan internasional yang masuk ke wilayah Kalimantan Barat, menyediakan alat canggih yang bekerja secara otomatis untuk mendeteksi narkoba masuk yang memanfaatkan pintu lintas batas perbatasan Kalimantan Barat, melakukan kerjasama dengan warga masyarakat yang berada di sekitar wilayah perbatasan untuk memberikan laporan (Gafar, 2012). 3) Upaya Polda Kalimantan Barat dalam menanggulangi kecenderungan meningkatnya perdagangan lintas batas illegal di kawasan perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak adalah dengan melakukan Revitalisasi Kemampuan Penyidik, Pemuliaan Profesi, Implementasi Komitmen Profesi, dan Peningkatan Kinerja Penyidik Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Barat. Selanjutnya direkomendasikan : Mengingat perdagangan bebas antara ASEAN dan China sudah berlaku sejak tahun 2010, maka ke depan diprediksikan akan semakin berkembang aktivitas perdagangan lintas batas antara Indonesia dengan Malaysia di Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak. Karena itu diperlukan peningkatan pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu antara pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Pengacara, dan Lembaga Pemasyarakatan, dan reformasi hukum terhadap KUHAP, UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI, UU No. 16 Tahun Tentang Kejaksaan RI, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya untuk mewujudkan sistem penegakan hukum tindak pidana yang profesional dan bebas KKN dalam Negara Hukum Indonesia (Sunandar, 2012). 4) Pengamanan wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan menempatkan berbagai pos lintas batas dan pos pengamanan. Pemanfaatan Pesawat Terbang Tanpa Awak (PTTA) telah terbukti sangat membantu di dalam pengintaian dan pengumpulan data (Anwar, 2021). 5) Strategi utama dalam pengembangan lintas batas adalah Melakukan kerjasama pengawasan dan keamanan yang lebih intensif di kawasan perbatasan (Sutandi dan Ardiansyah, 2015).

Karakteristik Infrastruktur Pelayanan Masyarakat

Merujuk pada karakteristik infrastruktur pelayanan masyarakat maka dirumuskan strategi pengembangan kawasan perbatasan lintas batas dengan strategi utama pembangunan kawasan perbatasan Kalimantan Barat berdasarkan referensi sebagai berikut, 1) membangun jaringan pemasaran dan perdagangan untuk produk pertanian dan perkebunan dan peningkatan kualitas pelayanan dasar dan jaringan transportasi. Strategi utama dalam pengembangan lintas batas adalah Pembangunan Infrastruktur untuk meningkatkan interaksi dan konektifitas antar negara untuk mendukung pergerakan orang dan barang serta meningkatkan kualitas pelayanan PLBN, antara lain; Custom, Immigration, Quarantine, Security (Sutandi dan Ardiansyah, 2015). 2) Saran dalam pengembangan kawasan perbatasan kabupaten Kapuas hulu adalah meningkatkan perekonomian dengan mengoptimalkan potensi lahan dan nilai tambah produksi komoditas unggulan pertanian dan perkebunan untuk pasar lokal, regional dan ekspor, meningkatkan pemenuhan pelayanan sarana dan prasarana dasar serta optimalisasi hubungan

kedua negara dalam rangka memanfaatkan peluang pembangunan kawasan perbatasan dan lintas batas antar negara (Sutandi dan Ardiansyah, 2015). 3) Keberhasilan pertanian sangat ditentukan oleh kondisi sumber air, Infrastruktur irigasi, pengelola irigasi, dan input lain diluar Irigasi. Dalam pengembangan kawasan pertanian di kawasan perbatasan, selain perlu didukung oleh infrastruktur irigasi juga perlu didukung oleh adanya teknologi pertanian yang meliputi : teknik budidaya, jaminan pemasaran, sarana produksi dan Infrastruktur pendukung lainnya, yang dapat mendorong perkembangan pertanian di kawasan perbatasan menjadi lebih berkembang, tidak terkecuali dorongan pembentukan P3A dan peningkatan partisipasi petani. Upaya untuk mendorong keberhasilan tersebut tidak bisa terlepas dari dukungan nyata dan intervensi positif berbagai instansi terkait, (PUSLITBANG Sumber Daya Air, 2014).

Karakteristik Penduduk

Melalui karakteristik penduduk berdasarkan literatur review adalah 1) Strategi utama dalam pengembangan lintas batas adalah Meningkatkan kualitas SDM dan daya saing masyarakat lokal perbatasan (Sutandi dan Ardiansyah, 2015). 2) Direkomendasikan kepada Kementerian Sosial dan instansi terkait lain agar berkolaborasi dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat kawasan perbatasan melalui program pendampingan. Hal ini untuk mengantisipasi agar program layanan sosial yang masuk dapat dinikmati dan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat kawasan perbatasan (Listyawati & ayal, 2018).

Karakteristik Ekonomi

Berdasarkan hasil analisa maka dibutuhkan strategi pengembangan kawasan perbatasan antara lain mendorong regulasi bidang ekonomi, dan meningkatkan peran sektor unggulan dan mendorong sektor lainnya dalam pertumbuhan perekonomian wilayah perbatasan (Irsan, Muta'ali, & Sudrajat, 2017). Selanjutnya dengan membina hubungan kerjasama dengan Negara tetangga melintasi batas-batas antar Negara yaitu kerjasama Sosek Malindo yang merupakan strategi untuk mempercepat pertumbuhan pembangunan daerah dalam konteks globalisasi. Melalui kerjasama Sosek Malindo secara signifikan memberikan sumbangan positif untuk pembangunan daerah wilayah Kalimantan, khususnya di kawasan perbatasan (Hariyate, 2015).

Karakteristik Sumber Daya Alam

Karakteristik sumber daya alam dalam optimalisasi perdagangan perbatasan telah dibuat strategi sebagai berikut, 1) dirumuskan strategi pengembangan kawasan perbatasan lintas batas dengan strategi utama pembangunan kawasan perbatasan yaitu Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan. 2) Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah produksi komoditas unggulan yang berdaya saing dan berpotensi ekspor (Sutandi dan Ardiansyah,

2015). 3) Pendekatan ekologi politik dapat membantu menggambarkan fenomena dengan mengaitkan kondisi lingkungan dan proses ekonomi politik. Ekologi politik menjadi operasional karena dapat menjadi politik kebijakan lingkungan, yaitu ketika pemerintah mampu bekerja sama secara integratif dengan swasta dan masyarakat. Manajemen sumber daya alam di masa depan harus secara jelas melibatkan hak pembagian sumber daya alam dan tanggung jawab pengelolaan di dalamnya. Untuk mencegah konflik pengelolaan sumber daya alam di perbatasan tidak berkembang pada skala lebih besar, maka pendekatan hukum keamanan perlu didukung dengan pendekatan kesejahteraan (Herdiansyah, 2019).

Karakteristik Sarana dan Prasarana pertahanan

Berdasarkan sarana dan prasarana Pendidikan maka strategi optimalisasi perdagangan perbatasan dapat dilakukan dengan 1) Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan pada bidang pendidikan di daerah perbatasan Kecamatan Kayan Hulu mengalami kekurangan tenaga guru di beberapa sekolah dalam penempatan guru-guru di setiap sekolah masih belum merata. dalam pembangunan sarana dan prasarana pendidikan masih banyak sekolah yang belum memiliki sarana pendidikan seperti perpustakaan, rumah dinas guru dan gedung sekolah yang layak, untuk bantuan operasional sekolah dalam pemberian bantuan ini sangat tidak diimbangi dengan pembimbingan dan pembekalan manajemen pengelolaan yang baik dan tepat guna dan jumlah bantuan yang diberikan belum cukup untuk memenuhi semua kebutuhan sekolah yang ada di daerah perbatasan karena di pengaruhi oleh kondisi daerah yang jauh (A'ing, 2015). 2) di bidang pendidikan, bahwa wilayah perbatasan sebagaimana halnya di daerah-daerah lain tingkat pendidikan masyarakat relatif lebih rendah. Persebaran sarana dan prasarana yang tidak dapat menjangkau desa-desa yang letaknya tersebar dengan jarak yang berjauhan, mengakibatkan pelayanan pendidikan di wilayah perbatasan selalu tertinggal dibanding daerah lainnya (Tri Poetranto, 2003). Untuk itu, pembentukan wawasan kejuangan melalui pendidikan kebangsaan sangat diperlukan, sebagai modal partisipasi masyarakat dalam mengisi pembangunan, terutama masyarakat perbatasan karena mereka memiliki aktivitas kesehariannya selalu bersama dengan penduduk negara tetangga (Suciati dan Ariningsih, 2016). Selanjutnya berdasarkan sarana dan prasarana Kesehatan strategi yang dapat dilakukan adalah 1) Dimasa pandemic perbatasan yang ada di Kalimantan Barat dilakukan penjaga yang ketat untuk menghindari masuknya penyebaran covid 19 Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi dan kebijakan yang diambil dalam menanggulangi bencana non alam pandemi Covid-19 merupakan kebijakan dan strategi yang berjenjang. Permasalahan yang terjadi dalam melaksanakan strategi dan kebijakan tersebut yang berasal dari: aspek substansi hukum yaitu kelemahan dari perangkat regulasi yang ada; aspek struktur hukum yaitu ketidaksiapan pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan kelemahan dalam sistem kesehatan nasional; serta aspek budaya hukum yaitu sulitnya mengatur dan mengubah perilaku masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19 (Bangun,

2022). Dalam lingkup sarana dan prasarana perhubungan optimalisasi perdagangan perbatasan dapat dilihat dengan, 1) Strategi-strategi pembangunan yang dilakukan oleh kabupaten bengkayang dalam mempercepat pembangunan yang baik dan menurunkan angka kemiskinan, yakni peningkatan kualitas Pendidikan, peningkatan kualitas Kesehatan, peningkatan kualitas kehidupan beragama, peningkatan kualitas tata Kelola pemerintahan, peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur, peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah, peningkatan pembangunan desa, peningkatan pembangunan Kawasan perbatasan, dan peningkatan kelestarian lingkungan hidup (Ilmi et al., 2022). Dalam sarana dan prasarana komunikasi dan informasi strategi peningkatan komunikasi dapat dilakukan dengan membuat suatu pengembangan teknologi komunikasi dan juga pemberian informasi publik serta penerapan-penerapan sosialisasi untuk membangun serta memberi pemahaman yang luas kepada masyarakat perbatasan. Sehingga setiap program yang bertujuan memberikan kesejahteraan masyarakat tidak menjadi kendala bagi masyarakat itu sendiri. Pendidikan politik untuk membangkitkan kesadaran melalui kajian pendidikan politik berbangsa dan bernegara yang menekankan kewajiban warga negara untuk menjalin komunikasi yang intensif dengan humas perbatasan pemerintah dengan menanamkan rasa fanatisme terhadap bangsa dan negara. Masyarakat perbatasan perlu menyeimbangkan kebutuhan taraf hidup melalui infrastruktur ekonomi, dan kebutuhan peningkatan kesejahteraan dengan menyediakan fasilitas yang dapat memicu kegiatan ekonomi yang lebih dinamis, dalam rangka partisipasi untuk menjaga keutuhan wilayah melalui pendekatan kesatuan politik, ekonomi, sosial dan budaya (Mujiono, 2022).

Karakteristik Fungsi dan Pemanfaatan Ruang

Karakteristik fungsi dan pemanfaatan ruang dapat dirumuskan strategi pengembangan kawasan perbatasan lintas batas dengan strategi utama pembangunan kawasan perbatasan adalah Pengembangan potensi pariwisata alam berwawasan lingkungan (Sutandi dan Ardiansyah, 2015). Serta pembangunan Terminal Barang Internasional (TBI) ini urgen untuk di bangun, agar ekspor impor tidak lagi harus ke Jakarta atau ke Pontianak. Jadi, kegiatan ekspor impor sudah bisa langsung dari TBI Entikong. TBI Entikong ini sepenuhnya untuk transaksi ekspor impor dan mempermudah pertukaran barang dari Indonesia ke Malaysia dan sebaliknya (Niko, 2019).

SIMPULAN

Permasalahan praktek *illegal logging*, *illegal fishing*, penyelundupan di darat maupun di lautan hampir sering terjadi di wilayah perbatasan Kalimantan Barat, hal ini menjadi suatu permasalahan yang perlu diselesaikan dikarenakan permasalahan sangat merugikan penghasilan negara sebab adanya eksploitasi sumber daya alam yang tidak sesuai peraturan yang berlaku akan mengurangi pendapatan daerah dan berpotensi kerusakan alam serta peningkatan kesenjangan dimasa yang akan

datang, oleh karenanya perlu dilakukan tindakan dari segenap pemangku kepentingan untuk pengelolaan perbatasan yang lebih baik yang semua tidak lepas juga dari peran dari masyarakat sekitar wilayah perbatasan. Langkah-langkah strategis sudah dilakukan pemerintah untuk mendorong pengelolaan perdagangan perbatasan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan, namun setiap Langkah pemerintah tidak dapat dilakukan secara optimal tanpa adanya dukungan dari masyarakat setempat, sehingga perlu dilakukan pembinaan dari pemerintah kepada masyarakat perbatasan tentang pentingnya sarana dan prasarana pertahanan serta bagaimana memanfaatkan hasil alam secara bijak dan berkelanjutan yang sesuai dengan peraturan yang ada, penataan ruang untuk pengembangan infrastruktur juga perlu dikaji lebih lanjut guna optimalisasi perdagangan perbatasan yang dapat mengakses seluruh pedesaan sekitar perbatasan, PLBN juga perlu dilakukan peningkatan sarana dan prasarana serta pengawasannya, dengan pengembangan karakter pegawai perbatasan dan menambah jumlah penjaga guna penerapan peraturan yang lebih baik dan juga sebagai akses untuk perdagangan international. dari literatur review data sekunder seperti jurnal dan media yang didapatkan perihal optimalisasi berdasarkan karakteristik wilayah perbatasan maka penulis menyimpulkan beberapa startegi yang dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Berdasarkan karakteristik fisik garis batas di darat dan laut di wilayah batas negara Kalimantan Barat – Serawak, Pemerintah perlu melakukan sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat perbatasan terkait permasalahan *illegal logging*, *Illegal fishing*, dan penyelundupan. Pengusaha juga tidak terlepas dalam informasi pentingnya menjaga wilayah perbatasan dari kegiatan-kegiatan illegal guna menjadi bagian dari pengawasan Bersama Pemerintah dan pengetahuan terkait resiko dari pelanggaran aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Karena biasanya praktek illegal ini tidak terlepas dari para pengusaha yang memiliki modal usaha namun menginginkan keuntungan yang besar dengan melakukan praktek-praktek upaya pelanggaran hukum yang berlaku, alhasil pengusaha dan masyarakat perbatasan yang memahami peraturan yang berlaku dapat melakukan perdagangan sesuai ketentuan perdagangan wilayah perbatasan dan secara langsung mempengaruhi peningkatan pendapatan negara di wilayah kedaulatan.
2. Berdasarkan karakteristik infrastruktur pelayanan masyarakat di wilayah perbatasan Kalimantan Barat -Serawak, untuk optimalisasi perdagangan perbatasan dapat dilakukan dengan mempercepat pembangunan infrastruktur pelayanan masyarakat dengan membangun jaringan pemasaran dan perdagangan untuk produk pertanian dan perkebunan, meningkatkan jaringan transportasi, dalam peningkatan potensi perdagangan perbatasan perlu juga dilakukan peningkatan pelayanan PLBN seperti *Custom*, *Immigration*, *Quarantine*, dan *Security* sehingga akan memberikan kemudahan pergerakan orang dan barang yang berdampak pada kepuasan masyarakat dalam aksesibilitas di wilayah perbatasan. Hal ini sejalan dengan semakin baik

pelayanan infrastruktur yang diberikan maka semakin tinggi tingkat kepuasan masyarakat.

3. Berdasarkan karakteristik penduduk di wilayah perbatasan, langkah optimalisasi perdagangan perbatasan adalah dengan mengutamakan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kawasan perbatasan dengan program pendampingan. Semakin sejahtera masyarakat di suatu daerah maka akan semakin meningkat transaksi ekonomi di wilayah tersebut, namun peningkatan kesejahteraan perlu dilakukan pendampingan secara komprehensif dimana perlu juga dikaji beberapa permasalahan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan sumber daya alam setempat serta tingkat kesenjangan penduduk di wilayah perbatasan dikarenakan penyebaran penduduk yang tidak merata.
4. Berdasarkan karakteristik ekonomi, Langkah optimalisasi perdagangan perbatasan yang dapat dilakukan adalah dengan mendorong regulasi bidang ekonomi perihal aturan yang dapat mendukung peningkatan penghasilan daerah perbatasan dan meningkatkan peran sektor sumber daya unggulan. Selain itu permasalahan utama ekonomi masyarakat perbatasan adalah permasalahan mikro yang sangat substansial di masyarakat perbatasan dalam mendukung kesejahteraannya, namun pada kenyataannya masih minimnya perhatian dari pemerintah. Minimnya perhatian ini dikarenakan kegiatan pemerintah yang masih mengarah dan berfokus kepada pengembangan di sektor makro ekonomi.
5. Berdasarkan karakteristik sumber daya alam, optimalisasi yang dapat dilakukan dalam mendukung perdagangan perbatasan adalah dengan menerapkan pendekatan ekologi politik dimana politik kebijakan lingkungan ini mampu bekerja sama secara integratif dengan swasta dan masyarakat. Selanjutnya perlu dilakukan pengelolaan untuk menghasilkan nilai tambah produksi komoditas unggulan untuk pasar lokal, regional yang berdaya saing dan berpotensi ekspor yang keseluruhan pengelolaan melibatkan pemerintah, pengusaha dan masyarakat perbatasan.
6. Berdasarkan karakteristik sarana dan prasarana pertahanan, perlu dilakukan peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan, peningkatan kualitas kehidupan beragama, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan tata ruang, peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur, peningkatan transportasi dan teknologi informasi. Dimana peningkatan dari sarana dan prasarana ini yang disertai dengan optimalisasi hubungan kedua negara dalam rangka pembangunan Kawasan perbatasan akan memberikan dampak positif terhadap pengelolaan perdagangan di lintas batas negara.
7. Berdasarkan karakteristik pemanfaatan ruang, dimana suatu Negara yang memiliki perbatasan yang baik dan maju adalah dikarenakan negara tersebut mampu membaca peluang demografis, geografis dan topografi di wilayah perbatasannya, dengan kemampuan pemerintah dan sumber daya lokal serta aparatur desa yang mampu mendata dan merencanakan tata ruang yang baik akan mendukung peningkatan potensi perdagangan perbatasan. Terhadap

potensi-potensi yang ada diperbatasan perlu dorongan lebih lanjut dari pemerintah yang mempunyai kekuatan didalam regulasi untuk mengarahkan swasta atau perusahaan agar menguatkan minatnya berinvestasi di wilayah perbatasan. dimana perdagangan perbatasan tidak hanya perdagangan barang dan jasa saja, namun juga dapat dilakukan dengan pemanfaatan lokasi perbatasan yang mempunyai potensi wisata dengan melakukan pengembangan pariwisata alam, sehingga dengan melakukan pemetaan fungsi tata ruang dan aksesibilitas yang tepat akan memberikan pengembangan potensi pariwisata yang bertaraf international.

Bagi Peneliti selanjutnya, peneliti menyarankan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian, mengkaji lebih dalam perihal strategi-strategi yang sudah dikembangkan dengan melakukan pengukuran yang lebih spesifik dengan menggunakan metode analisis SWOT. Selanjutnya juga perlu dikembangkan variabel-variabel lainnya yang mendukung pengembangan perdagangan di wilayah perbatasan sesuai keunggulan masing-masing wilayah perbatasan dan kemudian adanya pengkajian kembali dengan mengukur prioritas strategi yang telah dikembangkan berdasarkan variabel yang ada dengan metode Analytic Network Process (ANP) untuk mengetahui strategi apa yang dapat lebih diprioritaskan

REFERENSI

- A'ing, A. (2015). Studi tentang Pembangunan Bidang Pendidikan di Daerah Perbatasan Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau. *ejournal Pemerintah Integatif*, 3 (4), 545-559. Diakses dari : [http://ejournal.pin.or.id/site/wp-content/uploads/2016/05/2015_aylin_aing_studi_tentang_pembangunan_%20\(05-16-16-11-29-55\).pdf](http://ejournal.pin.or.id/site/wp-content/uploads/2016/05/2015_aylin_aing_studi_tentang_pembangunan_%20(05-16-16-11-29-55).pdf)
- Anwar, S. (2021). Pemanfaatan Pesawat Terbang Tanpa Awak untuk Pengamanan Perbatasan Kalimantan dan Dampaknya terhadap Ketahanan Wilayah, 27 (3), 289-308. Diakses dari : <https://journal.ugm.ac.id/jkn/article/view/69622/33071>
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Kecamatan Entikong dalam angka 2019*. Entikong: BPS
- Bangun, H. B. (2022). Studi Sosio-Legal Terhadap Pengaturan dan Pola Perdagangan Lintas Batas Negara di Pos Lintas Bats Negara (PLBN) Entikong. *Jurnal Komunikasi Hukum*. 08 (1). doi: <http://dx.doi.org/10.23887/jkh.v8i1.43606>.
- Bangun, H.B. (2014). Membangun Model Kerjasama Pengelolaan Perbatasan Negara di Kalimantan Barat-Sarawak (Suatu Studi Perbandingan). 43 (01), 31-39. doi: 10.14710/mmh.43.1.2014.31-39.
- Christina, C., Janice, C., Kurniawan, M. A., Lukito, T., Winola, L., & Arkan, A.A. (2021). Pengaruh Border Trade Agreement (BTA) dan Border Crossing Agreement (BCA) sebagai Landasan Hubungan Diplomatik Indonesia-Malaysia. 2746-

3826. Diakses dari :
<https://journal.unpar.ac.id/index.php/Sentris/article/view/5187>
- Diakses dari : <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/100909/inpres-no-1-tahun-2019#:~:text=INPRES%20No.%201%20Tahun%202019,Dikawasan%20Perbatasan%20%5BDIH%20BPK%20RI%5D>
- Diakses dari : <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/157946/inpres-no-1-tahun-2021>
- Diakses dari : <https://www.pu.go.id/berita/kementerian-pupr-tambah-penjaga-kedaulatan-nkri-di-kalbar-plbn-jagoi-babang-juga-jadi-pusat-pertumbuhan-ekonomi>
- Djuhardi, L. (2019). Konflik Internal Masyarakat Perbatasan, *Jurnal Ilmu Komunikasi IDIK*, 1 (1), 17-32.
- Friederich. (2021, April 28). Satgas Pamtas Yonif 642/Kapuas amankan kayu illegal, nih buktinya. *jpnn.com*. Diakses dari : <https://www.jpnn.com/news/satgas-pamtas-yonif-642kapuas-amankan-kayu-ilegal-nih-buktinya>
- Gafar, Y. (2012). Penanggulangan Peredaran Narkotika di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat (Indonesia)-Sarawak (Malaysia) (Studi terhadap peranan Badan Narkotika Nasional), 2 (2), 1-20. Diakses dari : <https://www.neliti.com/publications/10682/penanggulangan-peredaran-narkotika-di-wilayah-perbatasan-kalimantan-barat-indone>
- Hakim, L. (2019, Oktober 09). 21 Kapal Ikan Ilegal Dimusnahkan di Kalbar. *Kkp.go.id*. Diakses dari : <https://kkp.go.id/djpsdkp/stasiunpontianak/artikel/14342-21-kapal-ikan-ilegal-dimusnahkan-di-kalbar>
- Hariyate, N. (2015). Kerjasama Kawasan Perbatasan dan Pembangunan Daerah Kalimantan (*Border Regional Cooperation and Regional Development in Kalimantan*). *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*. 20 (2), 19-29. Diakses dari <http://jurmafis.untan.ac.id/index.php/ProyeksiNiraHaryatie>
- Helmi. (2019, November 25). Infrastruktur Transportasi dan Harapan warga di Daerah Perbatasan Kalimantan. *Bisnisnews.id*. Diakses dari : <https://bisnisnews.id/detail/berita/infrastruktur-transportasi-dan-harapan-warga-di-daerah-perbatasan-kalimantan>
- Herdiansyah, H. (2019). Pengelolaan Konflik Sumber Daya Alam Terbarukan di Perbatasan dalam Pendekatan Ekologi Politik, 7 (2), 144-151. doi : <https://doi.org/10.18196/hi.72134>
- Ilmi, I.M., Kiswara, J.G.,& Mustika, S. (2022). Kesiapsiagaan RSAL Ilyas dalam Dukungan dan Pelayanan Kesehatan sebagai Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI di Perbatasan Kalimantan Utara-Malaysia. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9 (1), 340-349. Diakses di : <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/3930>
- Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain dan Skouw.

- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan 11 (Sebelas) PLBN terpadu dan sarana prasarana penunjang dikawasan perbatasan
- Irawan, A., Astuti, A.S., & Khairi, M. (2020). Model Pencegahan Berbasis Masyarakat Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging di Wilayah Perbatasan Kalimantan Utara, *01* (2), 1-17. Diakses dari : <https://journal.unpak.ac.id/index.php/pajoul/index>
- Irsan, R., Muta'ali, L., & Sudrajat, S. (2017). Pertumbuhan Bidang Ekonomi di Perbatasan Indonesia-Malaysia, *Prosiding Seminar Nasional Geografi UMS VIII 2017* (hlm. 803-812). Yogyakarta, Indonesia: Universitas Gadjah Mada.
- Kementerian PUPR Tambah Penjaga Kedaulatan NKRI di Kalbar, PLBN Jagoi Babang juga Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi. (2021, September 20). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Kuntjorowati, E. (2018). Effort of Between-Countries Border Society in Maintaining Social Welfare. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 16 (4), 345-358. doi: <https://doi.org/10.31105/jpks.v16i4.1402>
- Listyawati, A., & Ayal, N.L. (2018). Kondisi Sosial Ekonomii Masyarakat Kawasan Perbatasan Antarnegara Kajian Kawasan Perbatasan, *42* (1), 38-50. doi: <https://doi.org/10.31105/mipks.v42i1.2249>
- Maulana, I.M., Sutrasna, Y., & Halkis, M. (2019). Potensi Pembangunan Kawasan Perbatasan Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat dalam Perspektif Ekonomi Pertahanan (Analytic Network Process (ANP)), *5* (01), 165-192. Diakses dari : <https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/EP/article/view/553/535>
- Maulidiawati, N. (2021, September 22). Pemerintah bangun pos lintas batas negara di Kalbar. *Alinea.id*. Diakses dari : <https://www.alinea.id/nasional/pemerintah-bangun-pos-lintas-batas-negara-di-kalbar-b2cAB96L7>
- Mujiono, M. (2022). Manajemen Pendidikan Politik Masyarakat Perbatasan di Kalimantan Barat. *Educatioanl Journal: General and Specific Research*, *2* (1), 41-50. Diakses dari : <https://adisampublisher.org/index.php/edu/article/view/62/56>
- Muzwardi, A. (2016). Analisa Pengelolaan Manajemen Perbatasan (Studi Kasus: Illegal Fishing di Perairan Natuna). *Prosiding Seminar Nasional Penegakan Hukum Terhadap Kedaulatan Wilayah Perbatasan NKRI dalam Perspektif Hukum Internasional* (hlm. 100-110). Riau, Indonesia: Universitas Islam Riau.
- Niko, N., & Samkamaria. (2019). Terminal Barang International (TBI) dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Perbatasan Entikong, Indonesia-Malaysia. *01* (02), 104-114.
- PUSLITBANG SUMBER DAYA AIR. (2014). *Prototipe Pengembangan Jaringan Irigasi di Kawasan Perbatasan*. Bandung: Kementerian Pekerjaan Umum Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air.

- Safitri, R.A. (2021, September 24). Imigrasi Putusibau Amankan Pemulangan 41 TKI Ilegal ke Sambas. Imigrasi.go.id. Diakses dari : <https://www.imigrasi.go.id/id/2021/09/27/imigrasi-putussibau-amankan-pemulangan-41-tki-ilegal-ke-sambas/>
- Setiawan, A. M. (2014). Dampak Kerjasama Bilateral Indonesia – Malaysia Sosek Malindo Terhadap Masyarakat Perbatasan Sebatik Kalimantan Timur (Thesis), Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia.
- Sidik, F. (2017, Maret 23). Potensi Ekonomi Perbatasan Kalbar Bisa Sumbang 2%. Bisnis.com. diakses dari : <https://kalimantan.bisnis.com/read/20170323/411/639836/potensi-ekonomi-perbatasan-kalbar-bisa-sumbang-2>
- Suciati, S., & Ariningsih, A. (2016). Pengembangan Model Pendidikan Menengah “Sekolah Kebangsaan: di Daerah Terpencil, Tertinggal, Terluar dan Perbatasan sebagai Implementasi Pembelajaran Pkn. Jurnal Moral Kemasyarakatan, 1 (1), 76-86. Diakses dari : <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JMK/article/view/1188/934>
- Suharmiati., Handayani., & Kristiana, L. (2012). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Daerah Terpencil Perbatas di Kabupaten Sambas (Studi Kasus di Puskesmas Sajingan Besar), (hlm. 223-231) doi: 10.22435/bpsk.v15i3 Jul.2996
- Sunandar, A.H. (2012). Penanggulangan Peredaran Gula Illegal di Luar Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, 2 (2), 0216-2091. Diakses dari : <https://media.neliti.com/media/publications/10665-ID-penanggulangan-peredaran-gula-illegal-di-luar-kawasan-perbatasan-kalimantan-bara.pdf>
- Sutandi, A., & Ardiansyah, M. (2015). Strategi Pengembangan Kawasan Perbatasan Dan Lintas Batas Antarnegara Di Kabupaten Kapuas Hulu–Provinsi Kalimantan Barat (Doctoral dissertation, Bogor Agricultural University (IPB)), Diakses dari : <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/80036>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. Diakses dari : <http://jdih.kemendag.go.id/backendx/image/old/2014/03/11/undang-undang-no-7-tahun-2014-tentang-perdagangan-id-1398788263.pdf>
- Widodo, L. (2016). Peyelundupan Gula di Perbatasan Entikong Studi Fenomenologi Tentang Keterlibatan Individu dalam Praktek Penyelundupan Gula di Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, 4 (3), 2442-5273. Diakses dari : https://jurnafis.untan.ac.id/index.php/sociologique/article/view/1152/pdf_67
- Yanto, E. M. (2021, Maret 26). Peyelundupan 100 Ton Rotan Ilegal di Kalbar Berhasil digagalkan Bea Cukai. Cendananeews.com. Diakses dari : <https://www.cendananeews.com/2021/03/penyelundupan-100-ton-rotan-illegal-di-kalbar-berhasil-digagalkan-bea-cukai.html>
- Yanto, E.M. (2021, Maret 26). Penyelundupan 100 Ton Rotan Ilegal di Kalbar Berhasil digagalkan Bea Cukai. Cendananeews.com. Diakses dari :

<https://www.cendananews.com/2021/03/penyelundupan-100-ton-rotan-ilegal-di-kalbar-berhasil-digagalkan-bea-cukai.html>

Yosada, R.K. (2016). Pendidikan di Beranda Terdepan Negara Perbatasan Entikong. *Prosiding Seminar Nasional FE UNY* (hlm.192-211). Sintang, Indonesia. STKIP Persada Khatulistiwa.

Yunanto, R. (2020, Oktober 07). Maraknya Penyelundupan Narkoba, Pengamanan Perbatasan RI-Malaysia di Kalbar diperketat. Kalbar.Inews.id. Diakses dari : <https://kalbar.inews.id/berita/marak-penyelundupan-narkoba-pengamanan-perbatasan-ri-malaysia-di-kalbar-diperketat>